



# LAPORAN

## HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TRIWULAN II (PERIODE APRIL – JUNI 2025)

**Berdasarkan**

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah**

**TRIWULAN II TAHUN 2025**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN  
TRIWULAN II (PERIODE APRIL-JUNI 2025)  
DI  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Yogyakarta  
Pada Hari Selasa, Juli 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA,**



**TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Puji syukur kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, akhirnya Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyelesaikan hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan II dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada masyarakat, oleh karena itu kami mengadakan survei ini secara berkala sebagai bagian dari rencana dan sasaran mutu dalam pemeliharaan kualitas layanan yang telah dicapai. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pengguna dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini bertujuan meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang diambil dengan menggunakan aplikasi e-Survey yang dikembangkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan - perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas dan masyarakat pengguna layanan kami.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2025

Ketua Tim Survei



Andang Catur Prasetya, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Sasaran .....	2
E. Definisi .....	3
BAB II METODOLOGI .....	4
A. METODE PENELITIAN .....	4
B. POPULASI DAN SAMPEL .....	4
C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI .....	5
1. PERSIAPAN .....	5
2. PROSES SURVEI .....	5
D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI .....	5
E. PROSEDUR SURVEI .....	6
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) .....	7
A. Profil Responden .....	7
1. Jenis Kelamin Responden .....	7
2. Tingkat Pendidikan Responden .....	7
3. Pekerjaan Responden .....	8
4. Domisili Responden .....	9
5. Kelompok Usia Responden .....	9
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator .....	9
1. Diskriminasi Pelayanan .....	9
2. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur .....	10
3. Penerimaan Imbalan/Suap .....	11
4. Indikator Pungutan Liar .....	12
5. Indikator Percaloan .....	13
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja .....	14

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	14
BAB IV_PENUTUP .....	16
A. Kesimpulan .....	16
B. Rekomendasi.....	16
C. Penutup .....	16
LAMPIRAN.....	17
1. Total Indeks .....	17
2. Karakteristik Responden.....	17
3. Data Umur Responden.....	17
4. Nilai Per Unsur .....	17
5. Tiga Unsur Terendah .....	18
6. Kuisisioner SPAK.....	18
7. Hasil Jawaban Responden.....	19

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Jenis Kelamin Responden .....	8
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden.....	9
Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden .....	10
Tabel 4. Domisili Responden .....	11
Tabel 5. Usia Responden.....	12
Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	13
Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	14
Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh .....	15
Tabel 9. Indeks Pada Indikator Pemberian Hadiah .....	16
Tabel 10. Indeks Pada Indikator Percaloan .....	17
Tabel 11. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang .....	18
Tabel 12. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia.....	19
Tabel 13. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.....	20
Tabel 14. Persepsi Anti Korupsi Pada Direktorat Jenderalla Badan Peradilan Umum.....	21

**DAFTAR GRAFIK**

	<b>Halaman</b>
Grafik 1. Jenis Kelamin Responden .....	8
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden .....	9
Grafik 3. Pekerjaan Responden .....	10
Grafik 4. Domisili Responden .....	12
Grafik 5. Rentang Usia Responden .....	13
Grafik 6. Indikator Manipulasi Peraturan .....	14
Grafik 7. Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	15
Grafik 8. Indikator Menjual Pengaruh .....	16
Grafik 9. Indikator Pemberian Hadiah .....	17
Grafik 10. Indikator Percaloan .....	18
Grafik 11. Indikator Perbuatan Curang .....	19
Grafik 12. Indikator Transaksi Rahasia .....	20
Grafik 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi .....	2

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit eselon I penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International Indonesia*. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### **B. Tujuan**

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

#### **C. Sasaran**

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

#### **D. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

### **E. Definisi**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

5 (Sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Diskriminasi pada pelayanan
2. Pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan
3. Penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku
4. Pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima
5. Praktek percaloan/perantara yang tidak resmi

## BAB II METODOLOGI

### A. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### B. POPULASI DAN SAMPEL

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus:  $S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$  dimana:

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5%, 10 %

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0

Dengan memperhatikan jumlah pegawai aparaturnya pada lingkungan peradilan umum kurang lebih sebanyak 17.000 orang, maka merujuk pada **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** dapat ditentukan jumlah responden sebanyak 375 orang.

### C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (e- survey) sebagai alat pengumpul data. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive* sampling atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu masyarakat yang menerima pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta selama periode triwulan IV Tahun 2024. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

#### 1. PERSIAPAN

- a) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPAK.
- b) Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c) Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey.

#### 2. PROSES SURVEI

- a) Pelaksanaan e-survey dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) yang telah disematkan pada website Ditjen Badilum.
- b) Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui E- survey dilakukan dengan mengakses link berikut: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
- c) Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey.

### D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling

tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk *skoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## **E. PROSEDUR SURVEI**

Responden dapat mengisi e-survey persepsi korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-survey, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, Nomor Telp dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat IPAK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator- indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Diskriminasi pada pelayanan
2. Pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan
3. Penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku
4. Pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima
5. Praktek percaloan/perantara yang tidak resmi

## BAB III

### INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

#### A. Profil Responden

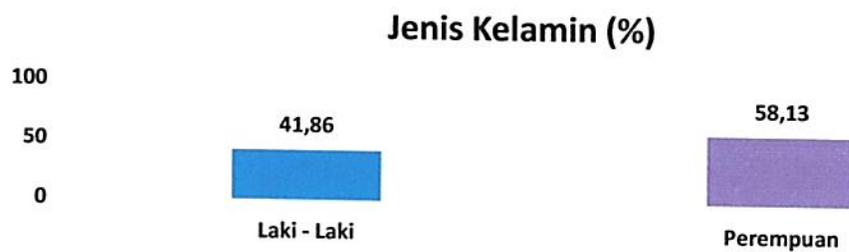
##### 1. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 129 reponden, dimana pengguna layanan yang berjenis kelamin Laki – Laki sebanyak 54 orang atau 41,86% dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 75 orang atau 58,13%.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Laki - Laki	54	41,86
2	Perempuan	75	58,13
Jumlah		129	100

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini;



Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

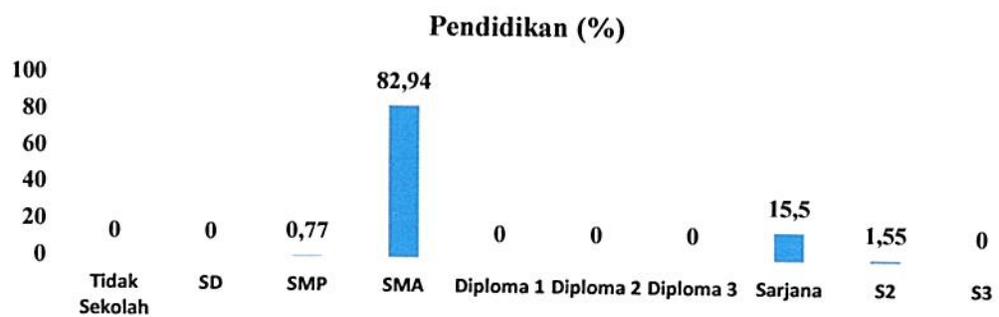
##### 2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mayoritas memiliki latar belakang tingkat pendidikan SMU yaitu 107 orang atau 82,94%

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	1	0,77
4	SMA	107	82,94
5	Diploma 1	0	0
6	Diploma 2	0	0
7	Diploma 3	0	0
8	Sarjana	20	15,50
9	S2	2	1,55
10	S3	0	0
Jumlah		129	100

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

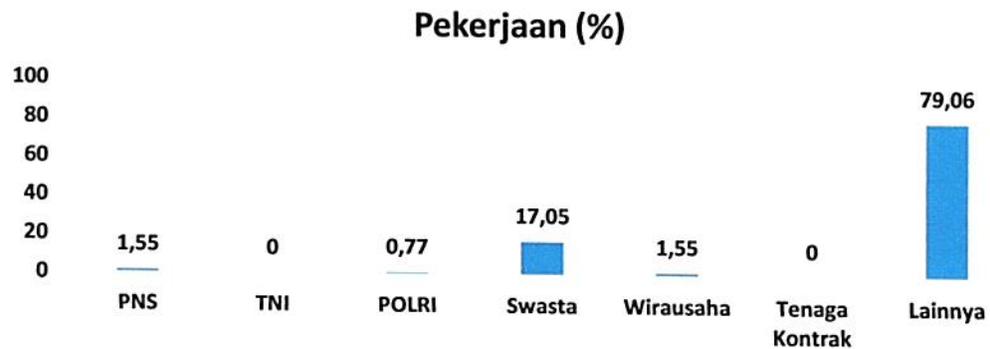
### 3. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa responden atau mayoritas pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki pekerjaan lainnya yaitu 102 orang atau 79,06%.

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	PNS	2	1,55
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	0,77
4	Swasta	22	17,05
5	Wirausaha	2	1,55
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Lainnya	102	79,06
Jumlah		129	100

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 3. Pekerjaan Responden

#### 4. Domisili Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa domisili pengguna layanan terbesar dari daerah Istimewa Yogyakarta dengan total responden sebanyak 129 orang atau 100%.

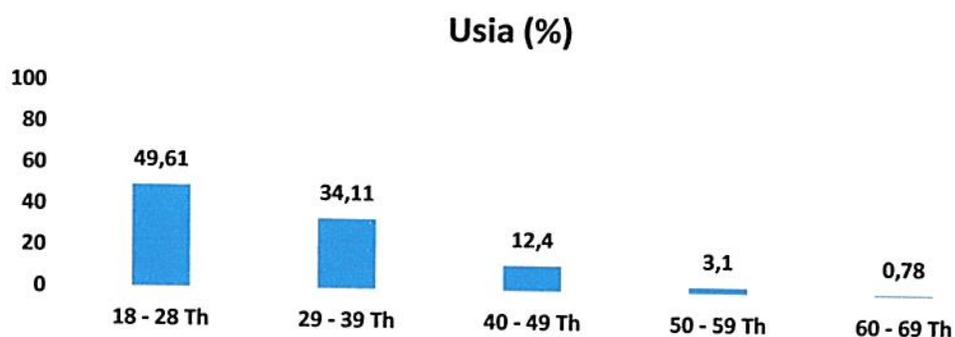
#### 5. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 18 – 28 Tahun sebanyak 64 orang dengan prosentase sebesar 49,61% dari total responden.

Deskripsi	Jumlah ( Orang )	% ( Persen )
18 - 28 Th	64	49,61
29 - 39 Th	44	34,11
40 - 49 Th	16	12,40
50 - 59 Th	4	3,10
60 - 69 Th	1	0,78
Total	129	100

Tabel 5. Usia Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. Rentang Usia Responden

## B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

### 1. Diskriminasi Pelayanan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi pelayanan menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	129	100
Jumlah			129	100

Tabel

### 6. Indeks Pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 6. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari 129 responden yang menjawab *tidak ada* 129 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada diskriminasi pelayanan*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat diskriminasi pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

DISKRIMINASI PELAYANAN	
Jumlah	516
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,800

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

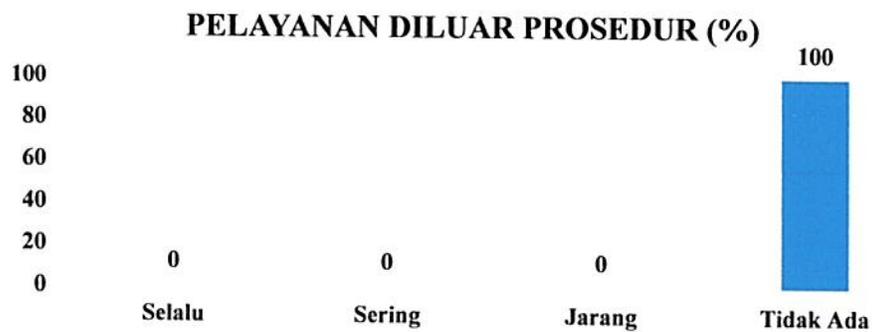
## 2. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan diluar prosedur menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	129	0
Jumlah			129	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Pelayanan Diluar Prosedur

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Pelayanan Dilaur Prosedur

Dari 129 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 129 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada pelayanan dilaur prosedur*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelayanan diluar prosedur pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	516
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,800

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

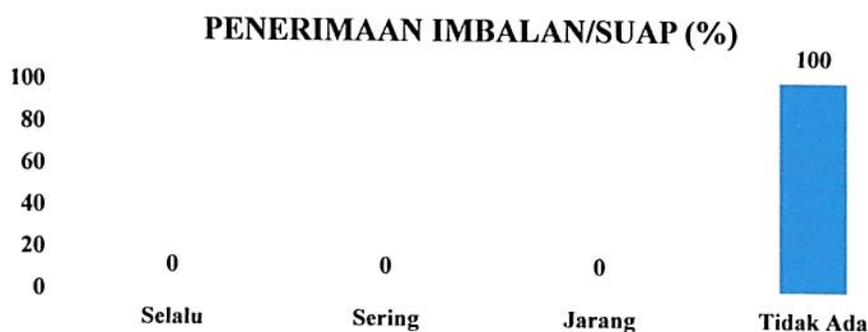
### 3. Penerimaan Imbalan/Suap

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan/Suap menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	129	0
Jumlah			129	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penerimaan Imbalan/Suap

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Penerimaan Imbalan/Suap

Dari 129 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 129 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada Penerimaan Imbalan/Suap*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penerimaan imbalan/suap pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	516
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,800

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

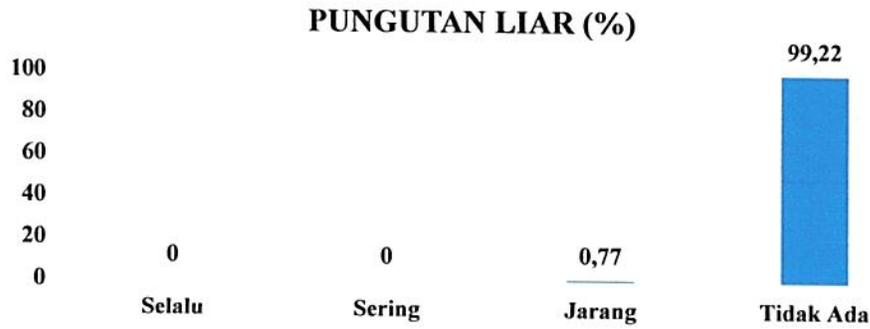
#### 4. Indikator Pungutan Liar

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	1	0,77
4	Tidak Ada	4	128	99,22
Jumlah			129	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penerimaan Imbalan/Suap

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Pungutan Liar

Dari 129 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 128 orang atau 99,22% responden menyatakan *tidak ada Pungutan Liar*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pungutan liar pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	515
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	3,992
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,798

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,992 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

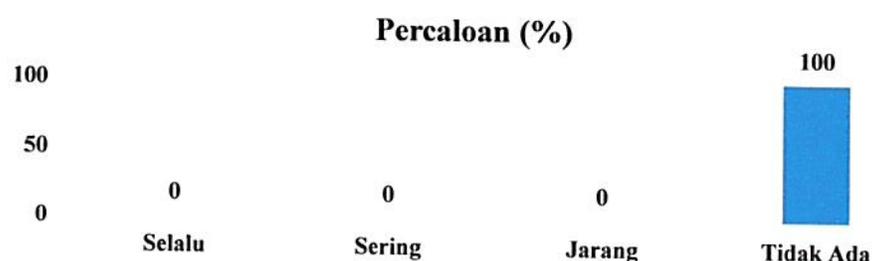
## 5. Indikator Percaloan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Percaloan menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	129	0
Jumlah			129	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Percaloan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Percaloan

Dari 129 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 129 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada Pungutan Liar*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pungutan liar pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	516
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,800

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,00 berada pada kategori “Sangat baik”.

### C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja

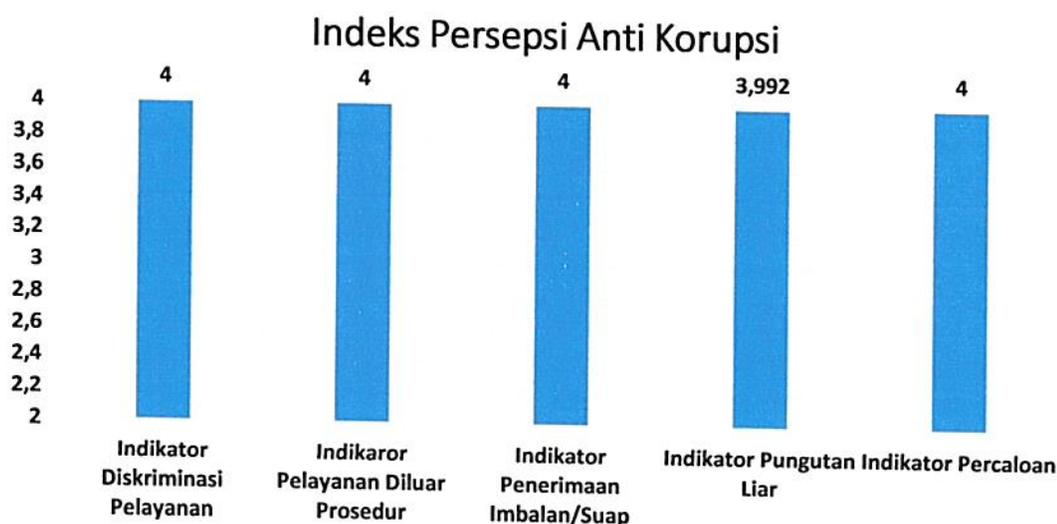
Dari 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta sebesar 4,00.

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Ranking
Q <sup>1</sup>	Indikator Diskriminasi Pelayanan	4,00	
Q <sup>2</sup>	Indikator Pelayanan Diluar Prosedur	4,00	
Q <sup>3</sup>	Indikator Penerimaan Imbalan/Suap	4,00	
Q <sup>4</sup>	Indikator Pungutan Liar	3,992	
Q <sup>5</sup>	Indikator Percaloan	4,00	

Tabel 13. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangking masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.



Grafik 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks 4,00 jika dikonversi menjadi prosentase menjadi 100% yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**, dimana nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 - 100.

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 14. Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dinilai bebas dari praktik-praktik koruptif oleh masyarakat pengguna layanan. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata pada seluruh indikator yang masing-masing memperoleh skor 4,000, yang termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Adapun rincian nilai masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Diskriminasi Pelayanan – 4,000

Pelayanan Diluar Prosedur – 4,000

Penerimaan Suap – 4,000

Pungutan Liar (Pungli) – 3,992

Percaloan – 4,000

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak mengalami atau tidak melihat adanya indikasi tindakan koruptif dalam proses pelayanan publik, baik dalam bentuk diskriminasi, penyimpangan prosedur, suap, pungli, maupun percaloan.

#### B. Rekomendasi

Meskipun seluruh indikator memperoleh nilai maksimal, upaya pencegahan terhadap praktik korupsi harus tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan antara lain:

Mempertahankan integritas dan akuntabilitas pegawai, terutama di unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melakukan sosialisasi berkala tentang zona integritas dan larangan gratifikasi kepada masyarakat dan seluruh pegawai.

Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengaduan masyarakat melalui kanal resmi yang transparan dan mudah diakses. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalisir kontak langsung antara pengguna layanan dan petugas, sehingga potensi korupsi dapat dicegah.

Menindaklanjuti hasil survei ini melalui forum internal, untuk menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

#### C. Penutup

Survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi. Capaian nilai maksimal pada seluruh indikator menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, dan menjadi modal penting dalam membangun pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

## LAMPIRAN

### 1. Total Indeks

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
--------------	---------------------	-------------------------	---------------------	--------------	-----------------

ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NILAI INDEKS

**4,00 / 99,96 %**

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

### 2. Karakteristik Responden

JUMLAH	129 RESPONDEN		
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 54 ORANG PEREMPUAN : 75 ORANG		
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG	
	SD : 0 ORG	Diploma 3 : 0 ORG	
	SMP : 0 ORG	S1 : 20 ORG	
	SMU : 107 ORG	S2 : 2 ORG	
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG	
PEKERJAAN	PNS : 2 ORG	SWASTA : 22 ORG	
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 2 ORG	
	POLRI : 1 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG	
	LAINNYA : 102 ORG		

### 3. Data Umur Responden

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Deskripsi			Jumlah ( Orang )	% ( Persen )	
18 - 28 Th			64	49,61	
29 - 39 Th			44	34,11	
40 - 49 Th			16	12,40	
50 - 59 Th			4	3,10	
60 - 69 Th			1	0,78	
Total			129		

### 4. Nilai Per Unsur

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisi Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur			
Deskripsi			U1	U2	U3	U4	U5	Keterangan
Jumlah			516	516	516	515	516	
NRR Per RL			4.000	4.000	4.000	3.992	4.000	19.992
NRR Tertimbang			0.800	0.800	0.800	0.798	0.800	3.998
<b>IPAK ZI Unit Pelayanan</b>								<b>99,96</b>

## 5. Tiga Unsur Terendah

3 Unsur Terendah 3 Unsur Tertingg

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?	515
2	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	516
3	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	516

## 6. Kuisisioner SPAK

Form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

### Data Responden

Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidik...

### Form Kuisisioner

Isian form kuisisioner IPAK

### Kesan & pesan

mohon isi kesan dan pesan Anda

### Data Responden IPAK

Nama boleh inisial atau tidak diisi.

Umur / Jenis Kelamin \*

tahun

Pilih Jenis Kelamin

Minimal 18 Tahun

Nomor HP \*

+62

Contoh: 8121112222

Domisili \*

Pilih Wilayah

Pendidikan \*

Pilih Pendidikan

Pekerjaan \*

Pilih Pekerjaan

Layanan \*

Pilih Layanan Yang Didapat

1 Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?

Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

2 Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?

Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

26	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4

67	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4
83	4	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4
104	4	4	4	4	4
105	4	4	4	4	4
106	4	4	4	4	4
107	4	4	4	4	4

108	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4
115	4	4	4	4	4
116	4	4	4	4	4
117	4	4	4	4	4
118	4	4	4	4	4
119	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4
122	4	4	4	4	4
123	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4
126	4	4	4	4	4
128	4	4	4	4	4
129	4	4	4	4	4